



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN FISKAL DAN KEUANGAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: MENDORONG PERAN INVESTASI DAN *FINTECH*

***VIRTUAL SEMINAR PERPAJAKAN AK2PI & UNIVERSITAS BATAM:
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PASAL 113 KLASTER PERPAJAKAN***

Dr. Adi Budiarso, FCPA

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan
Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan RI

15 Desember 2020

OUTLINE

1. PERKEMBANGAN COVID-19 DAN PEREKONOMIAN
2. STRATEGI PENINGKATAN INVESTASI UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI
3. DUKUNGAN FISKAL UNTUK MENDORONG INVESTASI
4. DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK MENDORONG *FINTECH* DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1

PERKEMBANGAN
COVID-19 DAN
PEREKONOMIAN



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



PANDEMI COVID-19 MENYEBAR DAN MASIH TERESKALASI DENGAN CEPAT KE SELURUH DUNIA

Tingkat kesembuhan pasien tinggi tapi peningkatan kasus dan kematian harian perlu diwaspadai.

KASUS KUMULATIF GLOBAL

65,52 JUTA

Kumulatif tertinggi:

1. AS 14,53 juta
2. India 9,57 juta
3. Brazil 6,49 juta
4. Rusia 2,37 juta
5. Perancis 2,26 juta
- ...
16. Afsel 800 ribu
- ...
21. **Indonesia 549 ribu**
22. Chile 555 ribu
- ...
26. Bangladesh 471 ribu
27. Filipina 435 ribu

J F M A M J J A S O

TOTAL KEMATIAN GLOBAL

1,51 JUTA

Fatality Rate 2,3%

Fatality rate di beberapa negara:

- Meksiko 9,5%
- Tiongkok 5,4%
- Peru 3,7%
- Inggris 3,6%
- Italia 3,5%
- Australia 3,3%
- Indonesia 3,1%**
- Brazil 2,7%
- Afrika Selatan 2,7%
- Filipina 1,9%

J F M A M J J A S O

TOTAL PASIEN SEMBUH

45,37 JUTA

Recovery Rate 69%

Recovery rate di beberapa negara:

- Tiongkok 94%
- India 94%
- Filipina 92%
- Vietnam 88%
- Malaysia 84%
- Indonesia 83%**
- Bangladesh 82%
- Rusia 79%
- Meksiko 74%
- AS 59%

J F M A M J J A S O

Di sisi lain, pandemi Covid-19 membentuk pola baru dengan gelombang-gelombang Covid-19 lanjutan yang terjadi di banyak negara → kasus harian meningkat sangat signifikan hingga lebih dari 660ribu/hari.

- 2nd wave terlihat jelas di Eropa, beberapa negara mulai menunjukkan tren penurunan kasus setelah memberlakukan restriksi ketat.
- 3rd wave sedang terjadi di Jepang dan Korsel

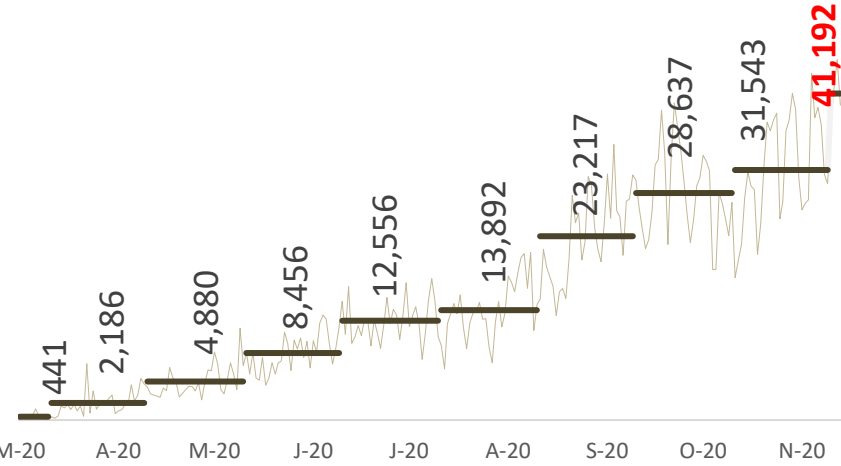




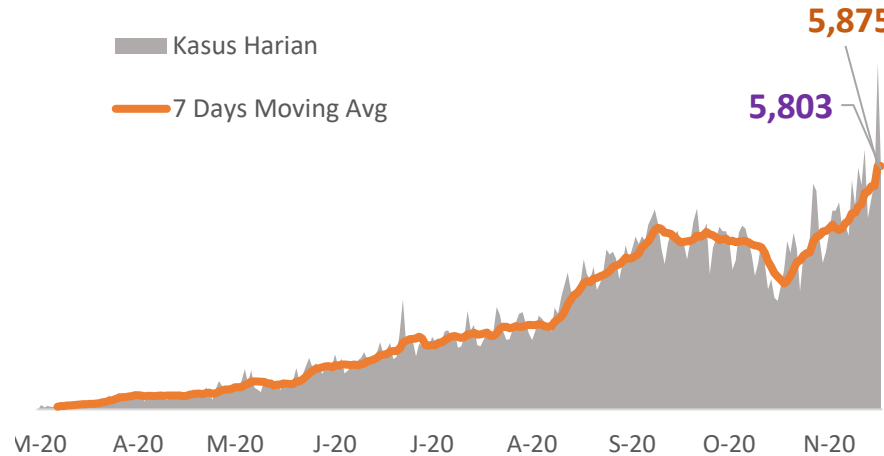
ESKALASI KASUS HARIAN COVID-19 DOMESTIK BERLANJUT



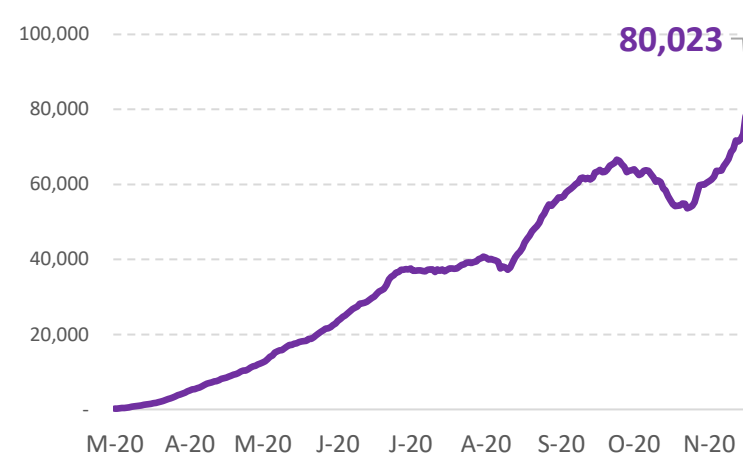
Jumlah Orang Dites/hari (4 Des)



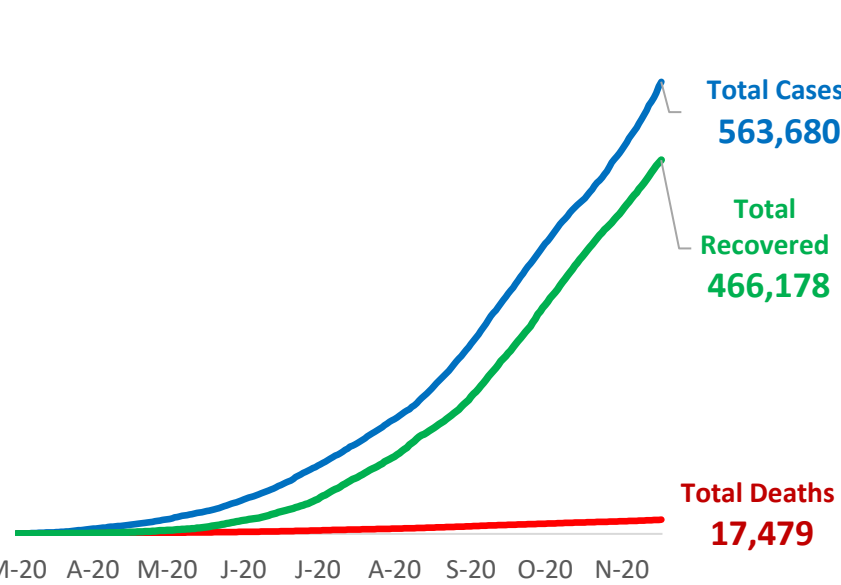
Kasus Harian (4 Des)



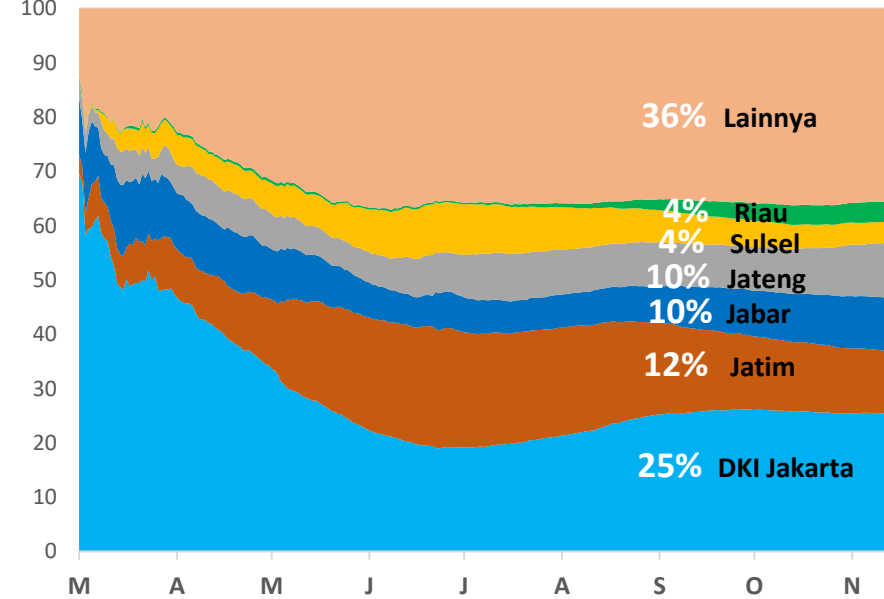
Kasus Aktif (4 Des)



Perkembangan Kasus (4 Des)



Distribusi Total Kasus



- ❖ Penambahan kasus Covid-19 terus eskalatif. Hal tersebut membuat kasus aktif di atas 80 ribu.
- ❖ Kondisi ini bersamaan dengan peningkatan jumlah tes, yang kini berada di atas 40.000.
- ❖ Selain didorong tes, kenaikan mobilitas khususnya setelah libur panjang akhir Oktober (Maulid Nabi), serta disiplin pada protokol kesehatan yang jauh dari optimal.
- ❖ Kenaikan kasus masih harus terus diwaspadai seiring perkiraan terjadinya beberapa kegiatan yang melibatkan berkumpulnya orang seperti aksi penyampaian aspirasi, Pilkada dan liburan.



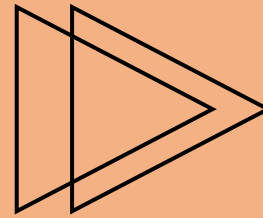
PENYELESAIAN VAKSIN TERUS MENUNJUKKAN PERKEMBANGAN POSITIF

Namun, sikap kehati-hatian perlu dijaga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan



PENGEMBANGAN VAKSIN GLOBAL MEMBERIKAN SINYAL POSITIF

- Inggris menjadi negara pertama yang menyetujui penggunaan vaksin untuk umum → menggunakan vaksin Pfizer dan BioNTech.
- Hasil uji awal menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi → Pfizer (95%), Moderna (94,5%), Sputnik (92%), dan AstraZeneca (70%)



DAMPAK BAGI DUNIA

- Sebuah tanda bahwa pandemi bisa diselesaikan lebih cepat.
- Menciptakan sentimen positif bagi perekonomian.



MESKI DEMIKIAN, DUNIA HARUS TETAP BERHATI-HATI DALAM MENYIKAPI PENEMUAN VAKSIN

- Vaksin merupakan sebuah komoditas dengan tingkat kompleksitas tinggi → Meski Inggris telah menyetujui penggunaan vaksin, sesungguhnya hingga saat ini belum ada satu pun vaksin yang diakui WHO telah melalui seluruh tahap uji klinis.
- Efektivitas vaksin menjadi hal yang perlu diobservasi dalam jangka waktu cukup lama.



INDONESIA TERUS BERUPAYA GUNA MEMASTIKAN VAKSIN TERSEDIA BAGI SELURUH MASYARAKAT

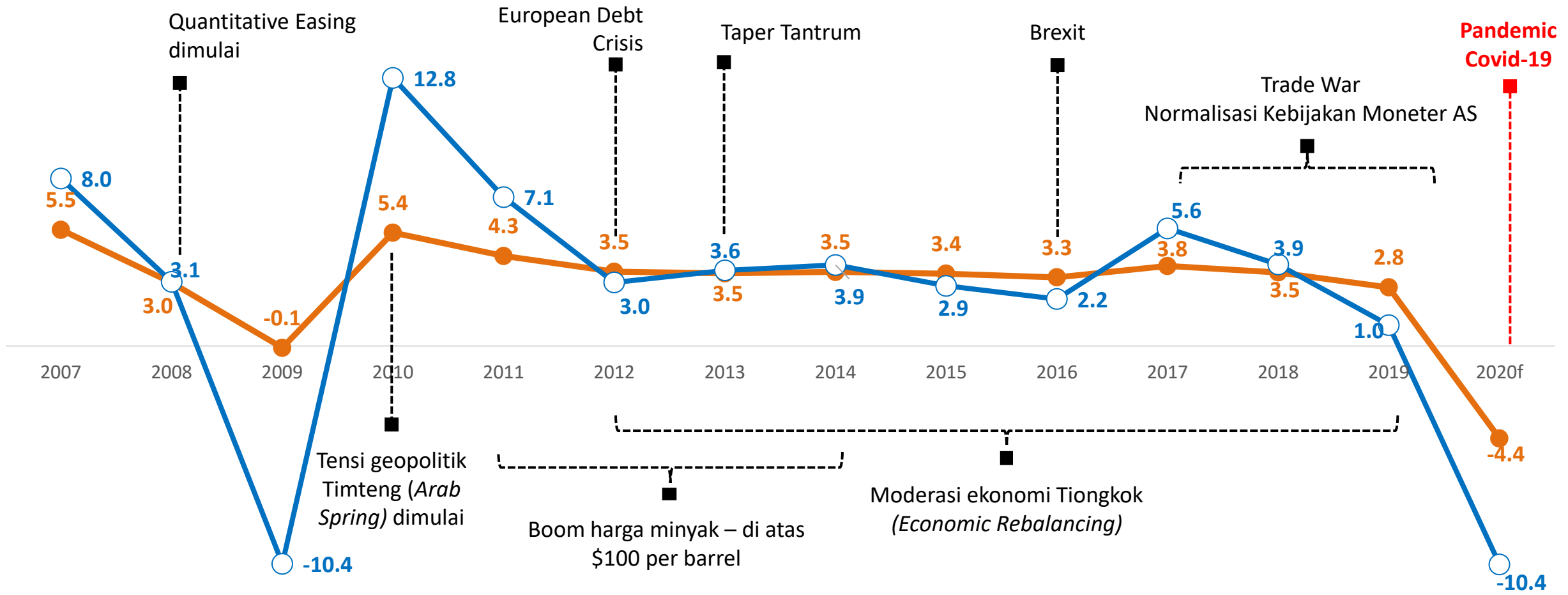
- Indonesia bekerjasama dengan Sinovac dalam penyediaan vaksin serta penelitian uji klinis.
- Indonesia juga terus mempercepat pengembangan Vaksin Merah Putih sejak Mei.
- Pentingnya untuk tetap menjaga protokol kesehatan melalui 3M dan TLI, hingga vaksin didistribusikan luas dan efektif.



TANTANGAN HEBAT SILIH BERGANTI, DAMPAK COVID-19 LUAS DAN MASIF

Tingkat pertumbuhan ekonomi global belum mampu kembali kepada level pre-GFC, bahkan turun tajam saat Covid-19

Global GDP & Trade Volume Growth (% , yoy)



Sumber: IMF WEO database, diolah

—●— GDP growth

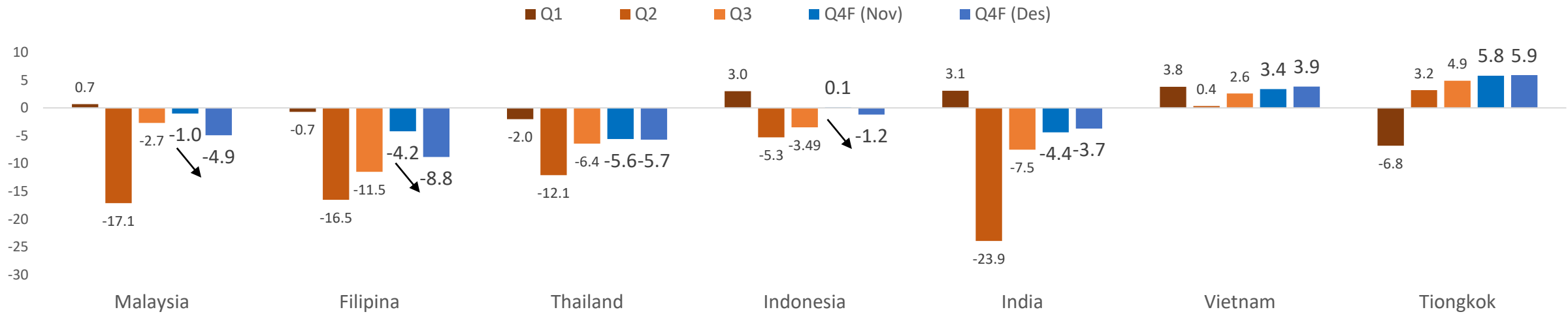
—○— Trade Volume Growth



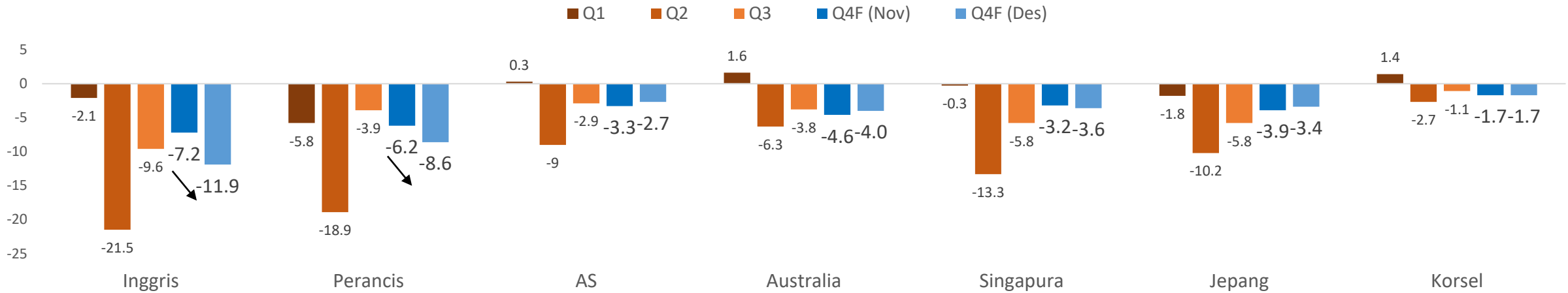
Q3-2020 menjadi turning point perbaikan ekonomi berbagai negara

Namun proyeksi Q4-2020 terkini menunjukkan perlambatan dibanding proyeksi sebelumnya, untuk beberapa negara di ASEAN dan Eropa di tengah kasus Covid-19 yang masih tinggi.

UPDATE PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI Q4-2020 NEGARA BERKEMBANG (% yoy)



UPDATE PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI Q4-2020 NEGARA MAJU (% yoy)

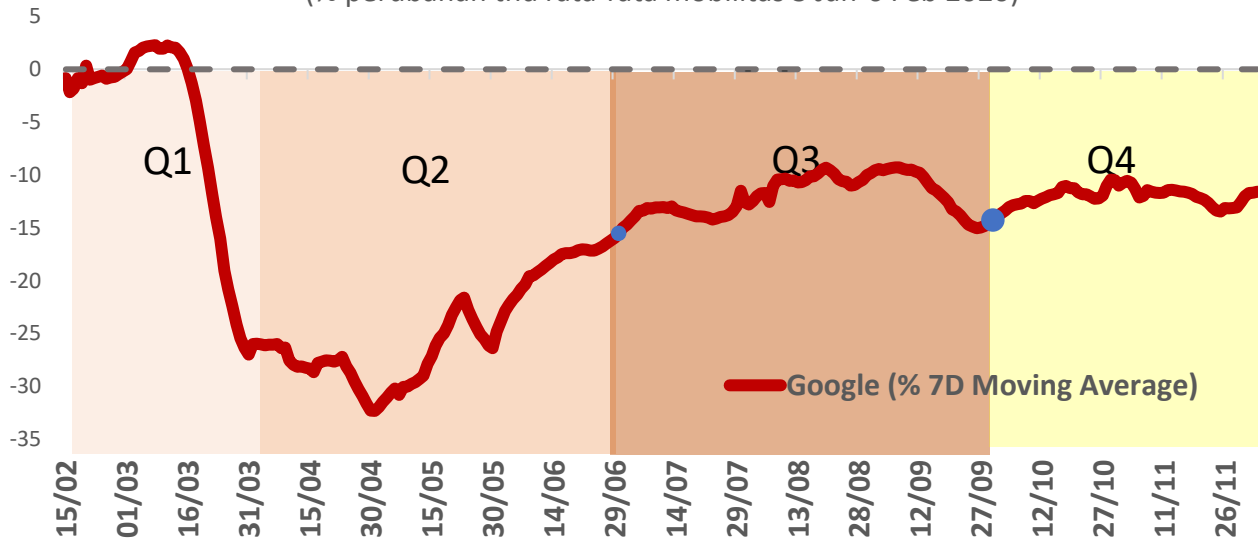




AKTIVITAS MASYARAKAT KEMBALI MENINGKAT DI AWAL DESEMBER

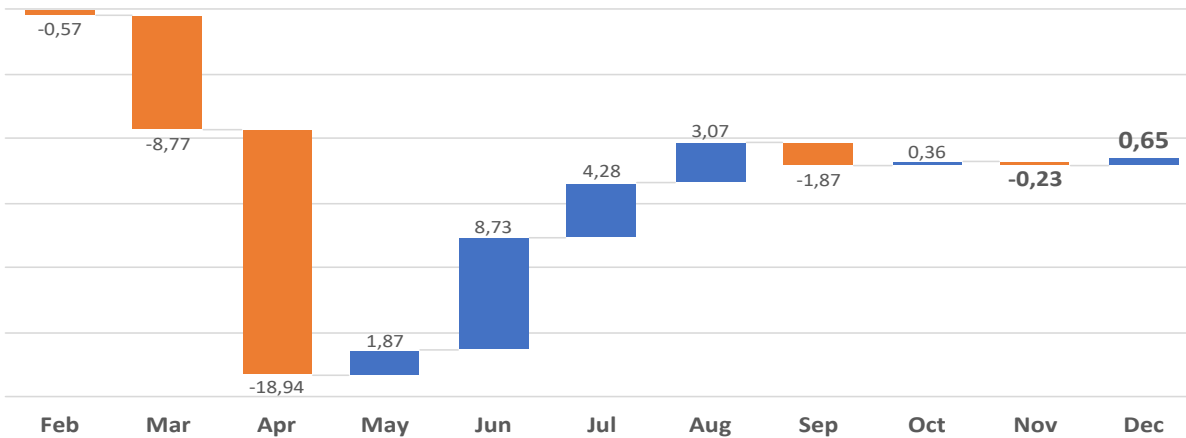


Perubahan Mobilitas
(% perubahan thd rata-rata mobilitas 3 Jan-6 Feb 2020)



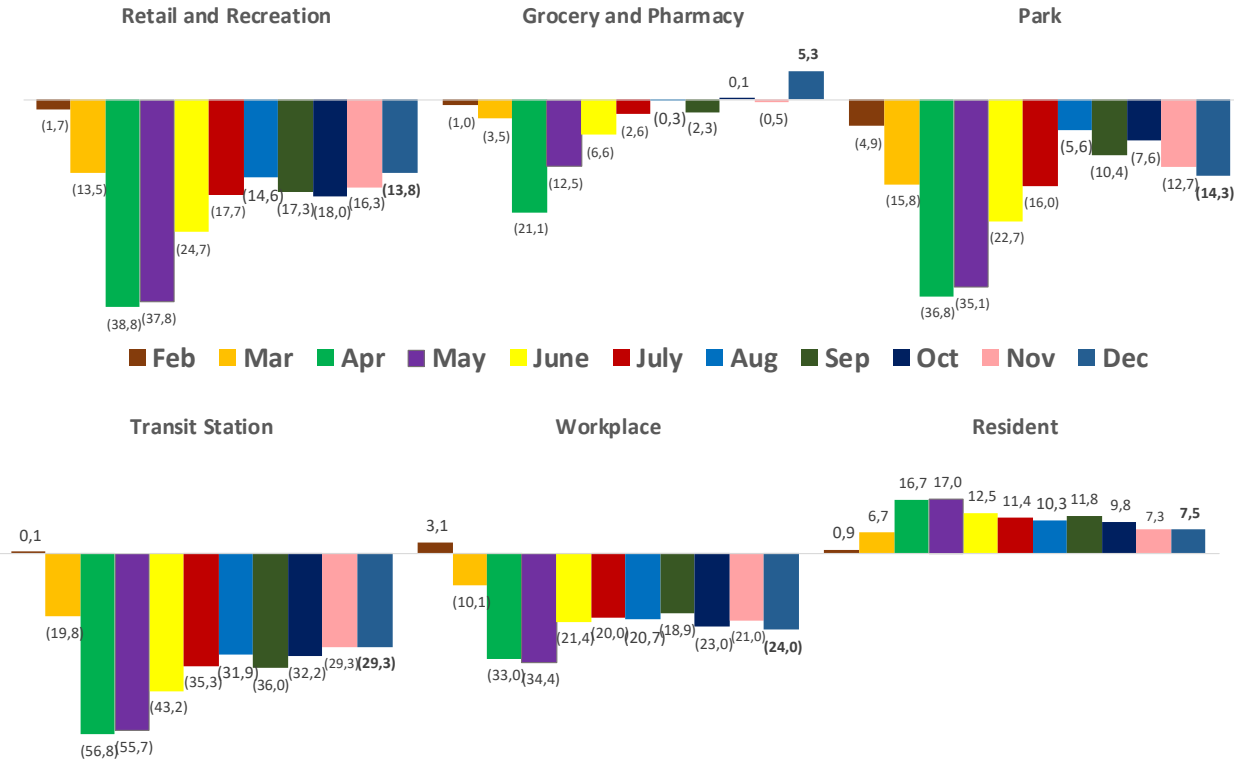
Perubahan Mobilitas Bulanan (%mtm)

■ Increase ■ Decrease ■ Total



Source: Google Mobility Report, sd. 4 Desember (diolah)

Mobilitas Bulanan per item



- Pemulihan aktivitas masyarakat ditunjukkan dengan semakin meningkatnya aktivitas di luar rumah.
- Secara khusus, mobilitas masyarakat di pusat perbelanjaan retail, grosir, transportasi menunjukkan perbaikan, sedangkan mobilitas di taman terus mengalami penurunan sejak Agustus.
- Di sisi lain, mobilitas di tempat kerja cenderung menurun..



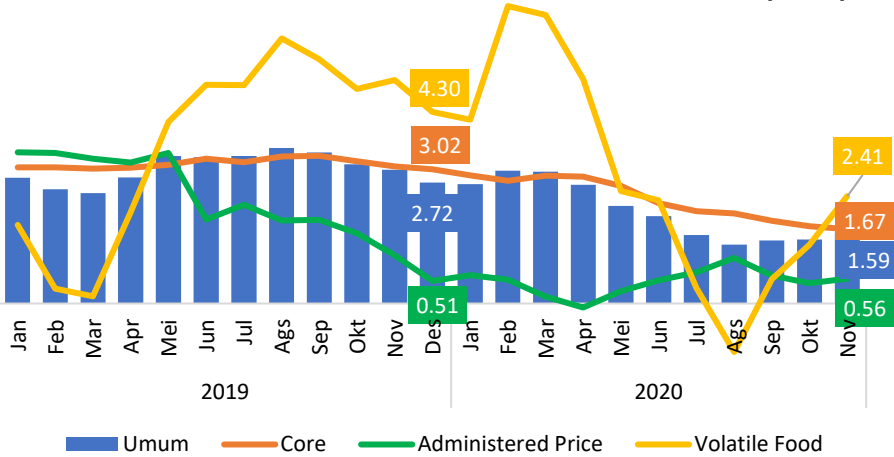
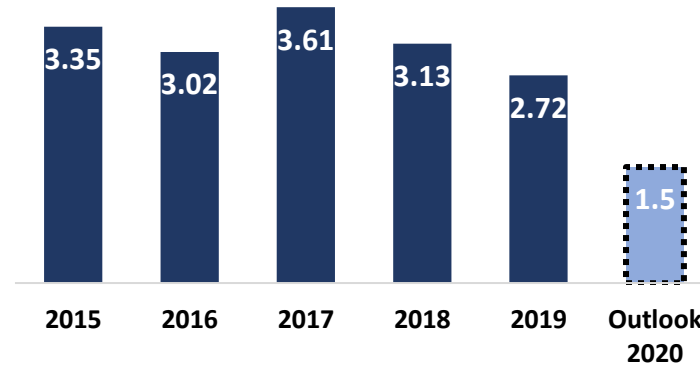
INFLASI MELANJUTKAN TREN PENINGKATAN

PERKEMBANGAN INFLASI DAN KOMPONEN (YOY)

Inflasi 2020 diperkirakan 1,5% (yoy)

Faktor laju perkembangan inflasi 2020

- Risiko kenaikan harga komoditas pangan bergejolak di akhir 2020 dan awal 2021, seiring periode musim tanam, masuknya musim hujan, dan dampak La Nina
- Potensi peningkatan permintaan pangan dan transportasi, Natal dan Tahun Baru.
- Kenaikan harga pangan diperkirakan terbatas dipengaruhi masih relatif lemahnya permintaan rumah tangga dan serapan industri serta upaya Pemerintah menjaga stabilitas harga pangan.



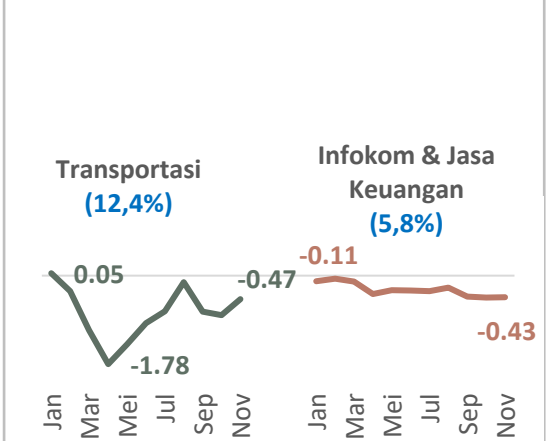
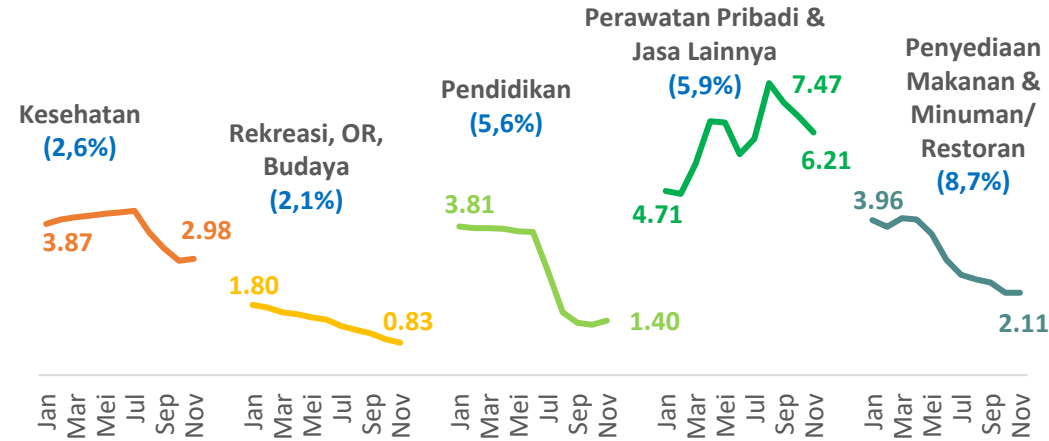
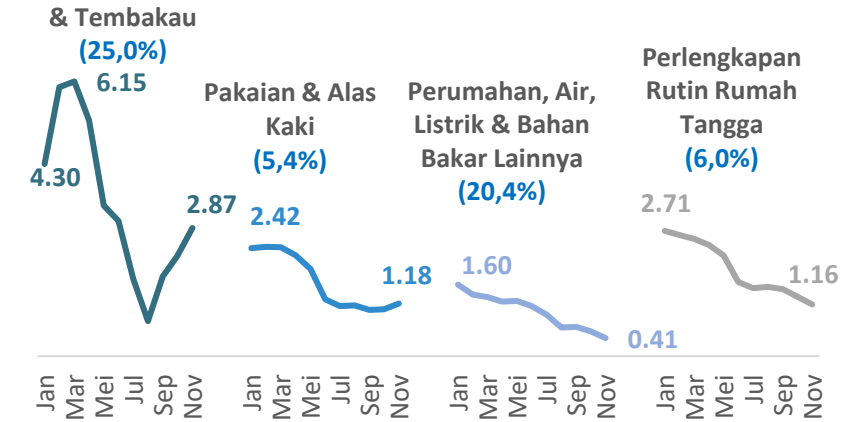
PERKEMBANGAN INFLASI KELOMPOK PENGELUARAN (YOY)

Kelompok pangan mengalami tren peningkatan, sementara kelompok sandang dan perlengkapan rumah tangga lainnya masih melambat.

Inflasi jasa-jasa cenderung masih menunjukkan perlambatan. Rekreasi dan Penyediaan makanan minuman melambat, mencerminkan sebagian aktivitas *leisure* yang masih relatif lemah.

Inflasi transportasi kembali meningkat seiring mulai membaiknya permintaan.

Makanan Minuman & Tembakau



*sumber: BPS, diolah **()share berdasarkan kelompok pengeluaran ***angka %yoy



PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO



INDIKATOR	2020		
	Perpres72	s.d. November	Outlook
Pertumbuhan Ekonomi	0,5	-2,03	-1,7 sd -0,6
(%, yoy)			
Inflasi	3,0	1,23 (ytd)	1,5
(%, yoy)		1,59 (yoy)	
Nilai Tukar	15.300	14.178(eop)*	14.600
(Rp/US\$)		14.608(ytd)*	
Suku Bunga SPN-3 bulan	4,5	2,99 (eop)**	3,21
(%)		3,21 (ytd)**	
Harga minyak mentah Indonesia	33	38,1 (eop)***	40
(US\$/Barel)		39,7 (ytd)***	
Lifting Minyak	705	689,7 (eop)****	705
(ribu barel per hari)		704,5 (ytd)	
Lifting Gas	992	915,7 (eop)****	992
(ribu barel setara minyak per hari)		981,3 (ytd)	

*per 12 Desember 2020 **per 1 Desember 2020 *** sd Oktober 2020 **** sd Oktober 2020

Perkembangan Indikator Ekonomi 2020

Pertumbuhan ekonomi

Pada triwulan III 2020, PDB tumbuh sebesar -3,49% (YoY); membaik dari triwulan sebelumnya yang sebesar -5,32% (YoY). Sehingga, PDB sd Q3 2020 tercatat tumbuh sebesar -2,03%.

Laju inflasi

Laju inflasi mulai menunjukkan sedikit peningkatan, didorong oleh kenaikan harga pangan seiring memasuki periode musim tanam.

Nilai Rupiah

Rupiah (ytd) bergerak menguat pada akhir November dibandingkan akhir Oktober 2020. Namun, Rupiah masih **terdepresiasi 2,04%** dibandingkan nilai tukar awal tahun 2020 hingga awal Desember 2020 ini.

SPN 3 bulan

Rata-rata tertimbang *yield* SPN 3 Bulan 3,22% (ytd). Lelang terakhir tanggal 1 Desember 2020 dengan *yield* yang dimenangkan 2,99%.

Harga Minyak Mentah Indonesia

ICP mencapai kisaran US\$39/barel dipengaruhi oleh masih tingginya kasus Covid-19 global dan pengetatan kembali pembatasan sosial di beberapa negara yang mengancam perbaikan permintaan minyak mentah.

Lifting Migas

Rata-rata Lifting minyak dan gas bumi hingga Oktober 2020 masing-masing mencapai rata-rata 704,5 bopd dan 981,3 boepd



PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DIPERKIRAKAN TERUS MENGUAT PADA TAHUN 2021



Proyeksi Pertumbuhan Indonesia dari Berbagai Institusi (% , yoy)

	Kemenkeu (Sept)	IMF (Okt)	Bloomberg (Median – Okt)	World Bank* (Sept)	OECD (Sept)	ADB (Sept)
2020	(1,7) – (0,6) Proyeksi sebelumnya (1,1) s.d. 0,2	(1,5) Proyeksi sebelumnya (0,3)	(1,1)	(2,0) – (1,6) Proyeksi sebelumnya 0,0	(3,3) Proyeksi sebelumnya (3,9) - (2,8)	(1,0) Tetap
2021	5,0	6,1 Tetap	5,6	3,0 – 4,4 Proyeksi sebelumnya 4,8	5,3 Proyeksi sebelumnya 2,6 – 5,2	5,3 Tetap

Revisi penurunan prospek pertumbuhan Indonesia pada tahun 2020 sebagian disebabkan oleh kasus Covid-19 yang masih eskalatif

*) catatan: proyeksi terkini World Bank terhadap Indonesia dan regional terdapat dalam East Asia Pacific Report edisi September, sedangkan proyeksi global terakhir ada dalam Global Economic Prospect edisi Juni 2020.



APBN INSTRUMEN UTAMA MERESPON DAMPAK PANDEMI DAN MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI



“EXTRAORDINARY POLICY”

Untuk merespons dampak COVID-19 sebagai kejadian luar biasa



“REOPENING & RECOVERY POLICY”

Komitmen untuk dapat mengatasi COVID-19 dan *jump-start* ekonomi



“RECOVERY & REFORM POLICY”

momentum untuk reformasi penguatan fondasi

IMMEDIATE RESPONSE: KEBIJAKAN EXTRAORDINARY

- Perpu No.1/2020 menjadi UU No.2/2020;
- Stimulus penanganan COVID-19 dan Program PEN, deisit APBN melebar 6,34% PDB

PEMBERIAN STIMULUS MENDUKUNG REOPENING

- PEN agar lebih implementatif sehingga dapat segera dieksekusi
- Jump start ekonomi di sisi Demand dan Supply

AKSELERASI PEMULIHAN & REFORMASI

- Mengakselerasi pemulihan dari dampak pandemi
- Mendorong transformasi melalui reformasi, menjaga agenda pembangunan

2020

2021

2

STRATEGI PENINGKATAN
INVESTASI UNTUK
MENDORONG
PERTUMBUHAN EKONOMI

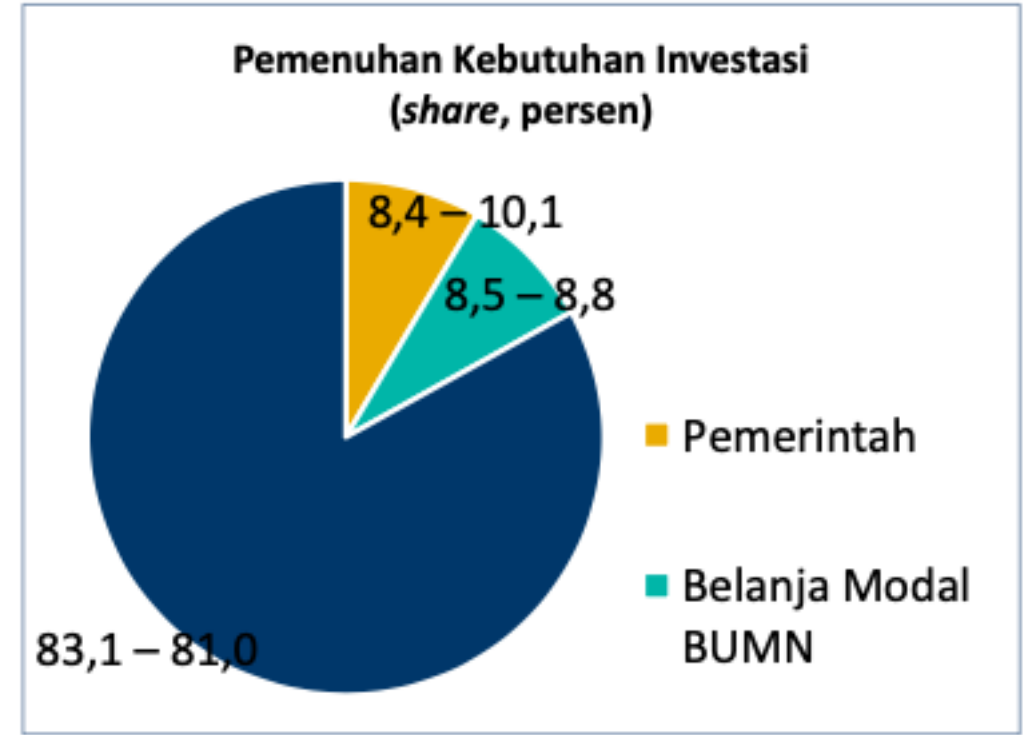
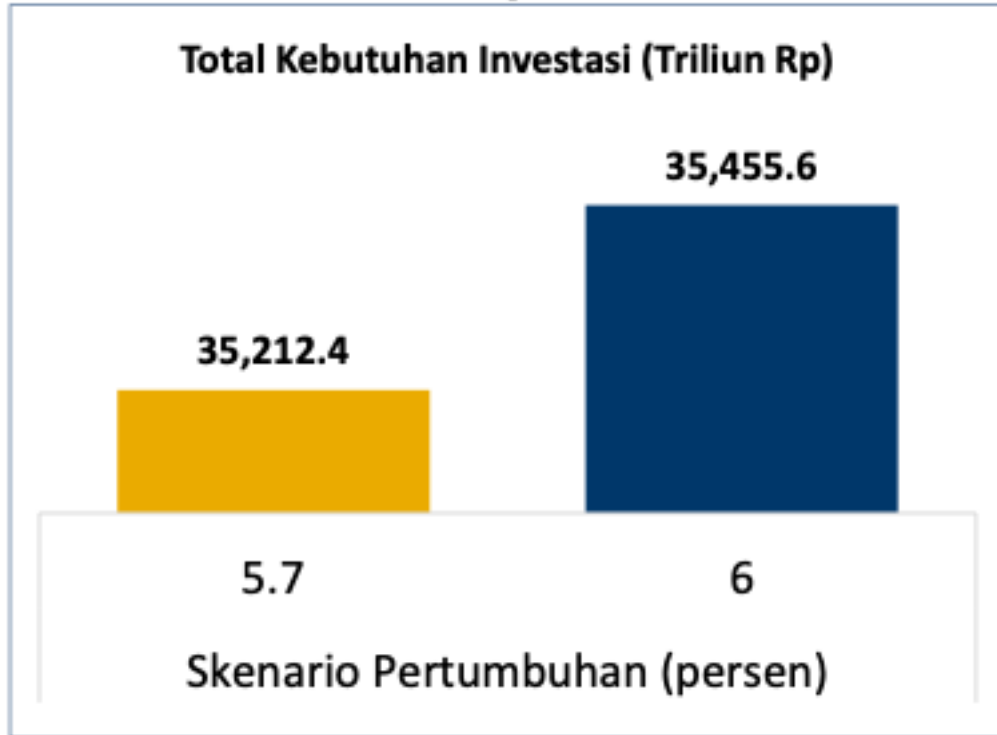


KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



INVESTASI MERUPAKAN SALAH SATU KUNCI PERTUMBUHAN EKONOMI

Terutama dalam rangka pemulihan ekonomi



Sumber: Bappenas, RPJMN 2020-2024

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, dibutuhkan investasi sebesar Rp35.212,4 - 35.455,6 triliun sepanjang tahun 2020-2024.

- Dari total kebutuhan tersebut, Pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 8,4-10,1% dan 8,5-8,8%,
- Sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta (83,1%-81,0%).



STRATEGI PEMERINTAH UNTUK MENDORONG INVESTASI DAN PEMBUKAAN LAPANGAN KERJA



PROGRAM KERJA PRIORITAS UNTUK MENDORONG REFORMASI STRUKTURAL



PENGEMBANGAN SDM



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



DEREGULASI



PEMOTONGAN BIROKRASI



TRANSFORMASI EKONOMI

LANGKAH KONKRIT PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI STRUKTURAL

Anggaran Pendidikan 2021 diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan melalui peningkatan skor PISA dan penguatan penyelenggaraan PAUD serta peningkatan kompetensi guru

Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang padat karya pasca pandemi COVID-19, melalui penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas dan penyelesaian kegiatan prioritas 2020 yang tertunda

- Penyederhanaan Regulasi melalui UU Cipta Kerja
- Pemotongan Birokrasi/Delayering
- Mendorong pertumbuhan investasi yang lebih tinggi
- Insentif Perpajakan



PERLUNYA TEROBOSAN UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAN DAYA SAING PEREKONOMIAN

untuk mengatur reformasi regulasi, debirokratisasi, & memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan





Omnibus Law

Reformasi dalam hal perizinan terkait percepatan pelaksanaan berusaha



UU No. 11/2020 tentang CIPTA KERJA



Segala bentuk kendala regulasi harus **disederhanakan**, harus kita **potong**, harus **dipangkas!**

-- Presiden Joko Widodo

20 Oktober 2019



Regulasi Responsif

Regulasi responsif terhadap gerakan pelaku usaha dan dinamika lingkungan industri



Harmonisasi Peraturan Perundangan

Proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan sebagai suatu bagian integral



Perlindungan Investor

Meningkatkan kepastian berusaha bagi investor



PENGEMBANGAN RISET UNTUK Mendukung Peningkatan Kualitas SDM dan Inovasi

Untuk menjawab tantangan global dibutuhkan reformasi pendidikan tinggi dan kebangkitan inovasi terutama untuk peningkatan daya saing dan pengentasan kemiskinan



MODEL KEBIJAKAN INOVASI



Berbagai kebijakan dibutuhkan untuk mendukung kebijakan INOVASI sehingga dapat mendukung kemajuan Industri, yaitu:

- o Daya Saing,
- o Kapasitas Inovatif,
- o Tingkat Difusi,
- o Pembelajaran, dan
- o Kewirausahaan

KEMAJUAN INDUSTRI akan mendukung

- o perbaikan bisnis yang ada,
- o perkembangan bisnis pemula yang inovatif, dan
- o perkembangan investasi yang akan saling mendukung.

3

DUKUNGAN FISKAL
UNTUK MENDORONG
INVESTASI



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Paradigma Baru dalam Pemberian Fasilitas Perpajakan



Simplicity & Certainty

- ✓ Sederhana dalam prosedur
- ✓ Memberikan kepastian atas hak dan kewajiban



Trust & Verify

- ✓ Proses kemudahan di awal sejalan dengan prinsip *self assessment*
- ✓ Verifikasi dalam rangka pengawasan



Pemberian insentif Pajak yang efektif dan sesuai dengan tujuan



Insentif menjadi lebih menarik untuk mendorong peningkatan investasi





FASILITAS PERPAJAKAN EKSTING, DIBERIKAN UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KEMUDAHAN BERUSAHA



FASILITAS SEKTORAL

Fasilitas PPh

- Tax Holiday
- Tax Allowance Investment Allowance Padat Karya
- Superdeduction vokasi
- Pembebasan PPh Pasal 22 Impor

Pembebasan PPN

Pembebasan Bea Masuk



FASILITAS KAWASAN

Kawasan Ekonomi Khusus

- Tax Holiday
- Tax Allowance
- Pembebasan PPh 22 Impor
- Pengecualian PPh 22 Hunian Mewah (Untuk KEK Pariwisata)
- Pembebasan PPN
- Pembebasan Bea Masuk

Kawasan Industri

- Tax Holiday
- Tax Allowance
- Pembebasan PPh 22 Impor
- Pengecualian PPh 22 Hunian Mewah (Untuk KEK Pariwisata)
- Pembebasan PPN
- Pembebasan Bea Masuk

Kawasan kepabeanan tertentu

- Pusat Logistik berikat
- Kawasan berikat



INSENTIF *TAX HOLIDAY*

PMK 130 Tahun 2020



Alat iradiasi	komponen elektronika	mesin
petrokimia	mesin pembangkit listrik	kendaraan bermotor
komponen robotik	Logam dasar hulu	pengilangan migas
kimia dasar organik	komponen kereta api	komponen pesawat
komponen kapal	kimia dasar anorganik	bahan baku farmasi
bubur kertas/pulp	infrastruktur ekonomi	Ekonomi digital



diberikan kepada industri pionir dengan nilai investasi minimal 100 miliar

- Kriteria industri pionir:
- Memiliki keterkaitan luas
 - Memberi nilai tambah/ eksternalitas tinggi
 - Memperkenalkan teknologi baru
 - Memiliki nilai strategis dalam perekonomian

Fasilitas Pengurangan PPh badan sebesar 50% atau 100% Selama 5-20 Tahun

- 50%
- 5 th : Rp100 M s.d. < Rp500M
- 100%
- 5 th : Rp500 M s.d. < Rp1 T
 - 7 th : Rp1 T s.d. < Rp5 T
 - 10 th : Rp5 T s.d. < Rp15 T
 - 15 th : Rp15 T s.d. < Rp30 T
 - 20 th : minimal Rp30 T



Jumlah industri pionir yang dapat diberikan *tax holiday* ada sebanyak 18 kelompok industri

Dirinci kembali dalam Peraturan BKPM menjadi 174 sektor

TAX ALLOWANCE

PP 78 Tahun 2019

diberikan atas investasi pada

INDUSTRI PRIORITAS NASIONAL



183
KBLI

Kriteria industri prioritas

memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor;

memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar;

memiliki kandungan lokal yang tinggi.



Pengurangan
Penghasilan neto
30%



PPh dividen
sebesar 10%



Penyusutan &
amortisasi
dipercepat



Tambahan kompensasi
kerugian lebih dari 5
tahun

BENTUK FASILITAS



Fasilitas *Investment Allowance*

untuk industri padat karya

PP 45 Tahun 2019

PMK 16 Tahun 2020

Untuk mendorong peningkatan penanaman modal baru pada sektor industri padat karya dan menurunkan pengangguran



Bentuk Fasilitas



Pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah nilai penanaman modal dan dibebankan selama 6 tahun

Sektor *Eligible*



Terdapat 45 sektor/KBLI yang tercantum dalam Lampiran PMK, yang berhak mengajukan fasilitas

Syarat & Kriteria



Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

melakukan investasi pada industri padat karya (tercantum dlm Lampiran PMK)

mempekerjakan tenaga kerja Indonesia minimal 300 orang



BEA MASUK DIBEBASKAN

PMK 176/PMK.011/2009 sttdt PMK 188/PMK.010/2015

Atas **Impor Mesin serta Barang dan Bahan**

Syarat Industri:

- Industri yang menghasilkan barang;
- Industri yang menghasilkan jasa (Pariwisata & Kebudayaan, Transportasi/ Perhubungan, Pelayanan Kesehatan Publik, Pertambangan, Konstruksi, Industri Telekomunikasi, dan Kepelabuhanan)

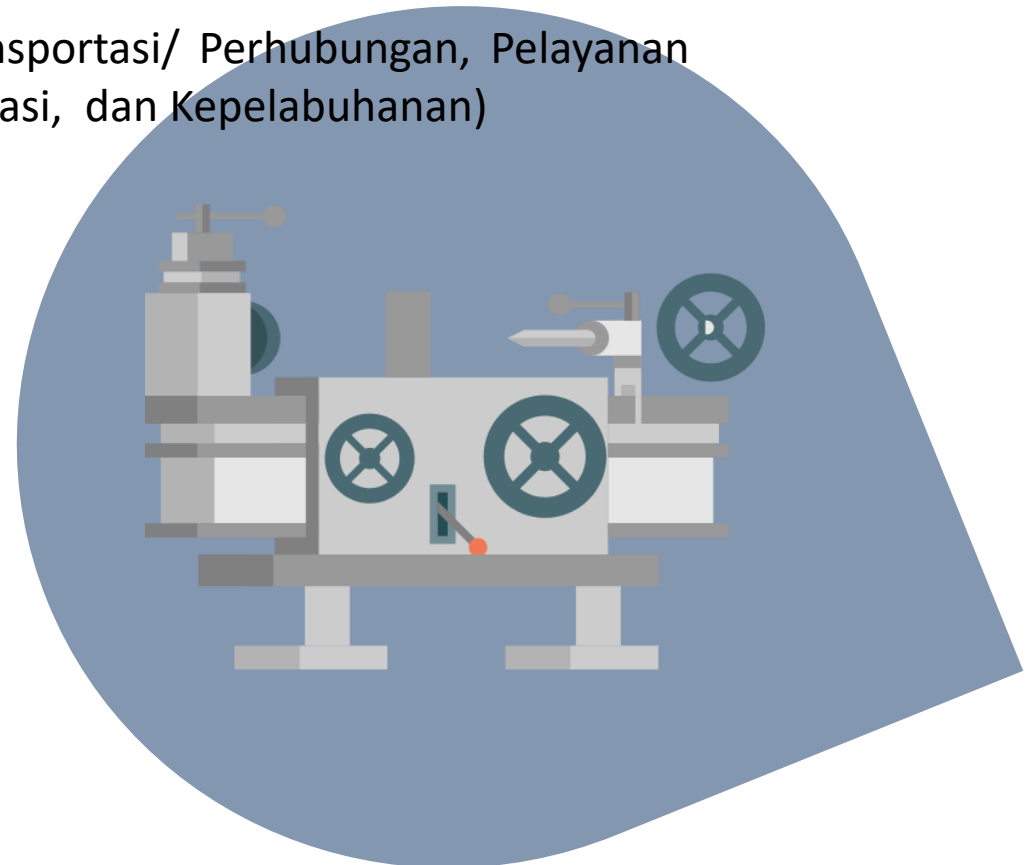
Jangka Waktu Fasilitas:

- Mesin : 4 tahun
- Barang dan bahan : 2 tahun s.d. 4 tahun

PPN DIBEBASKAN

PP 81 Tahun 2015 sttdt PP 48 Tahun 2020

Atas **impor dan/atau penyerahan mesin dan peralatan pabrik** yang merupakan satu kesatuan, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut, tidak termasuk suku cadang





SUPER DEDUCTION TAX

Diberikan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, membangun industri padat karya, serta meningkatkan penelitian dan pengembangan

VOKASI



FASILITAS

Pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, magang, dan/atau pembelajaran

INDUSTRI PADAT KARYA



FASILITAS

Pengurangan PPh neto sebesar 60% dari total penanaman modal

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



FASILITAS

Pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan



REALISASI PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

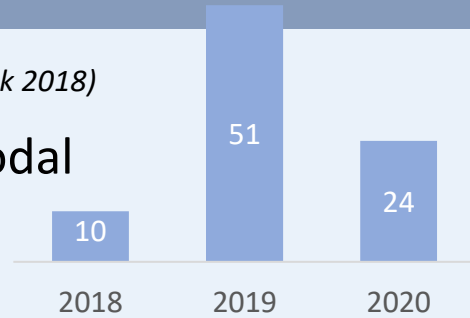


Total Penerima Fasilitas (sejak 2018)

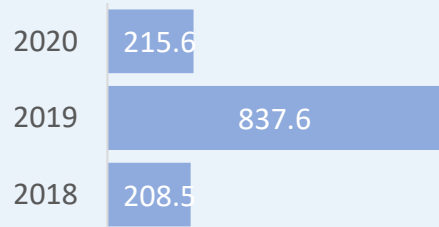


85 Penanaman Modal

82 Wajib Pajak



Rencana investasi
Rp**1.261,2T**



Penyerapan Tenaga Kerja **107.357** orang

Investasi yang telah terealisasi

(hingga 11 Okt' 2020)

3 Penanaman Modal

3 Wajib Pajak

Investasi
Rp**27,15T**

Tenaga Kerja
345 orang

TAX HOLIDAY

Total Penerima Fasilitas (sejak 2018)



186 Penanaman Modal

161 Wajib Pajak



Rencana investasi Rp**305,9T**

Investasi yang telah terealisasi

(hingga 11 Okt' 2020)

71 Penanaman Modal

Investasi
Rp**27,15T**
USD**8,5bn**

TAX ALLOWANCE

SUPER

DEDUCTION

Kegiatan Vokasi



TOTAL

107 Perjanjian Kerja Sama

16 Wajib Pajak



10.644

Peserta Magang,
Praktik Kerja
atau Pembelajaran



PEMERINTAH JUGA MEMBERIKAN INSENTIF DAN RELAKSASI PERPAJAKAN MELALUI UU 2/2020 dan UU 11/2020



Perpu 1/2020 yang disahkan menjadi UU 2/2020

Penyesuaian tarif PPh Badan DN dan BUT

Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan

UU 11/2020 (*Omnibus Law Cipta Kerja*)

Pembebasan PPh dividen diinvestasikan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu

Penurunan tarif PPh Pasal 26 atas penghasilan bunga

Relaksasi PPN, termasuk pengkreditan pajak masukan PPN

Penyesuaian sanksi administrasi dan imbalan bunga

Rasionalisasi Pajak Daerah



4

DUKUNGAN PEMERINTAH
UNTUK MENDORONG
FINTECH DALAM RANGKA
PEMULIHAN EKONOMI



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Digitalisasi Menjadi Pendorong Baru Aktivitas Ekonomi

Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari aktivitas bisnis

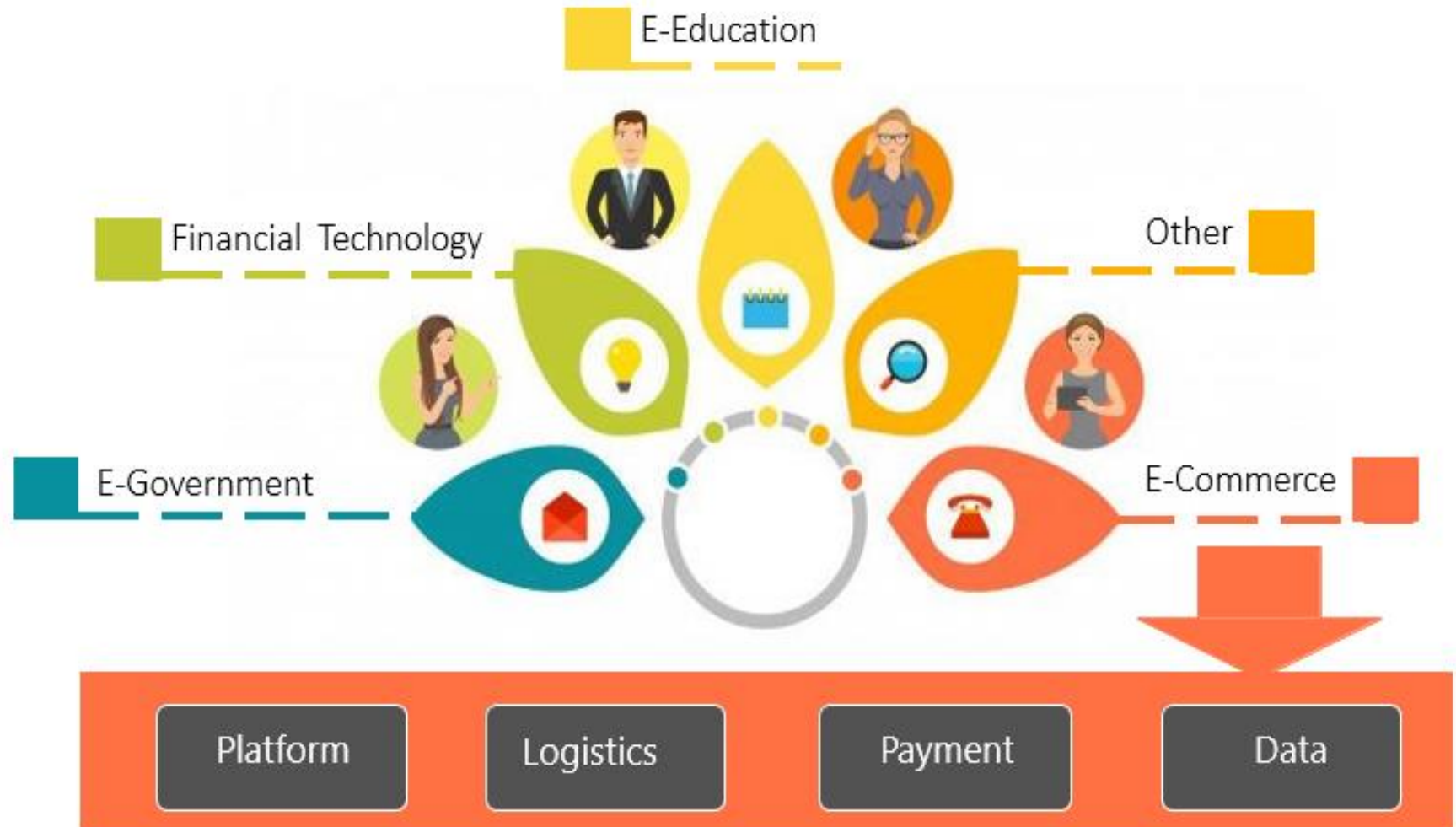


The **digital economy** refers to a broad range of economic activities that use digitized information and knowledge as key factors of production (ADB)



The “**digital economy**” is sometimes defined narrowly as online platforms, and activities that owe their existence to such platforms, yet, in a broad sense, all activities that use digitized data are part of the digital economy: in modern economies, the entire economy (IMF)

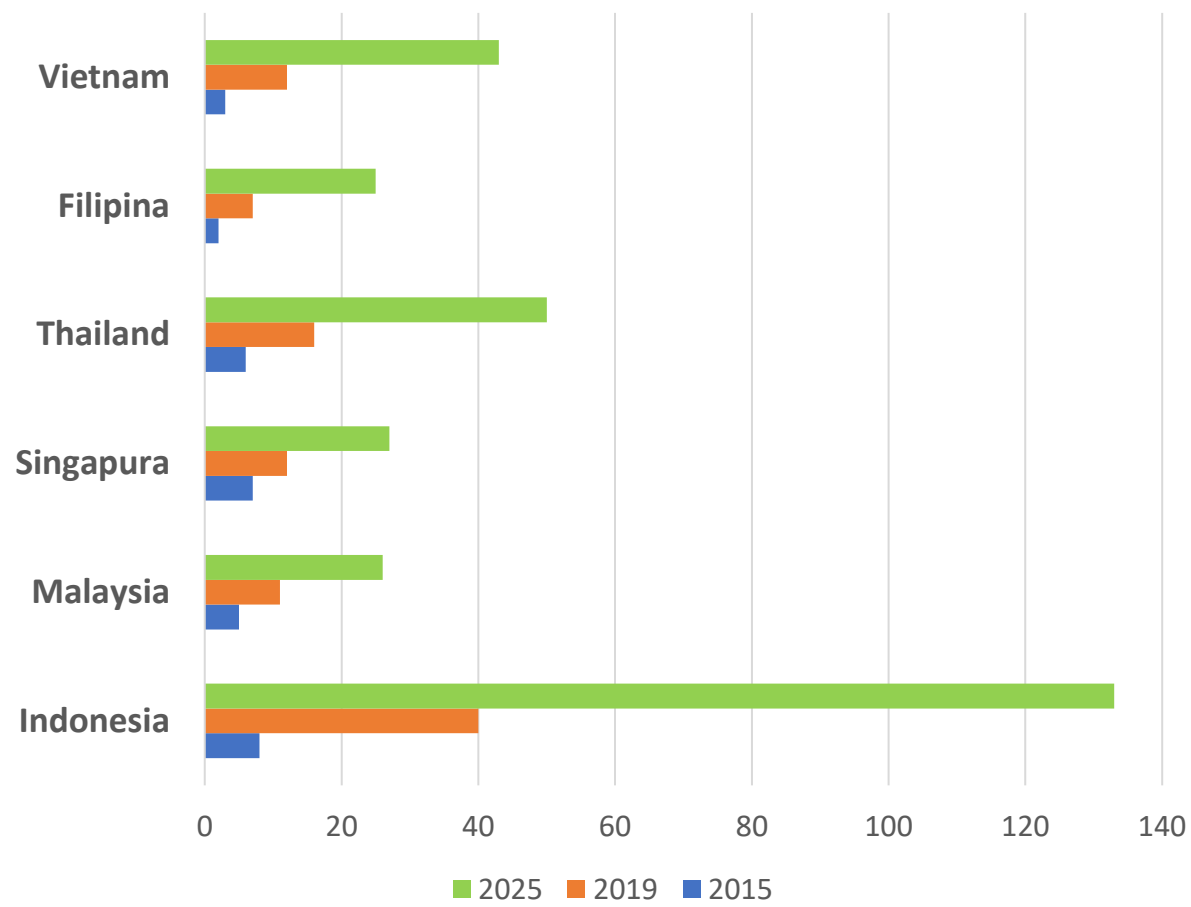
Digital Economy Ecosystem



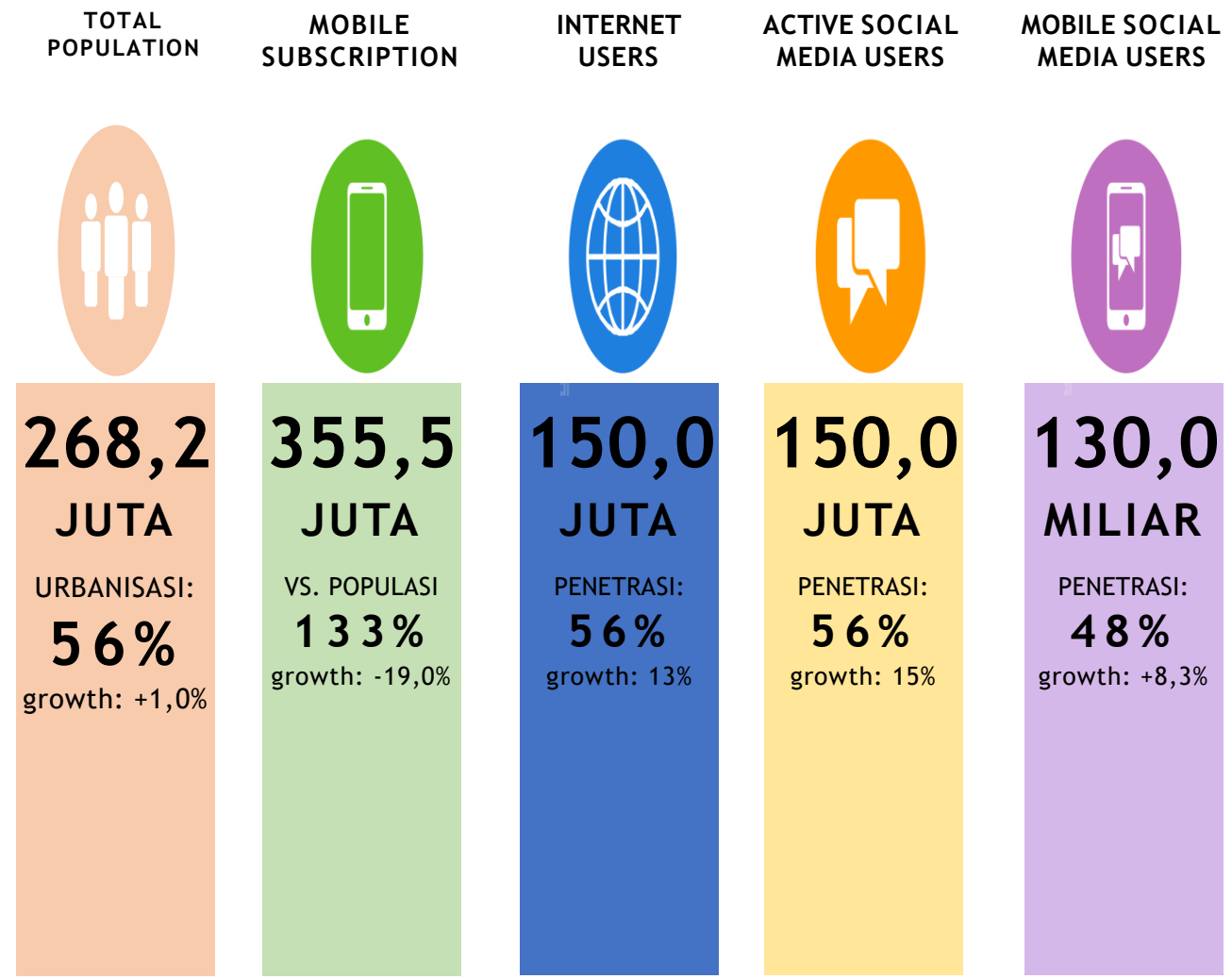
Ekonomi Digital Di Indonesia

Diproyeksikan akan terus tumbuh dengan dukungan penetrasi internet yang cepat

**Size Ekonomi Digital negara ASEAN
(USD miliar)**



Sumber: SEA Google, 2019

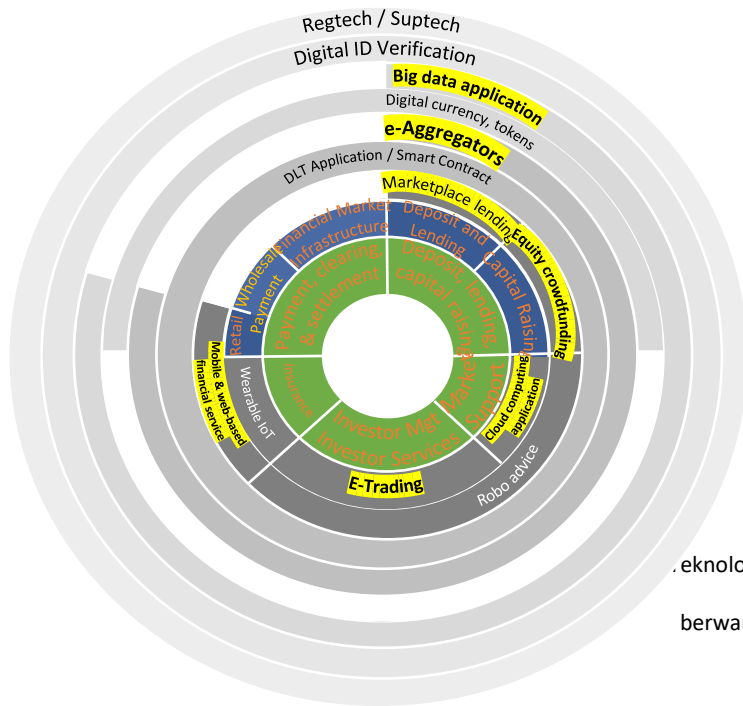


Sumber: Hootsuite, 2019

Fintech Berkembang Dengan Pesat

- Adaptasi teknologi tidak terhindarkan. Inovasi digital telah mengurangi friksi dalam industri.
- Inovasi digital telah berkembang di Indonesia dan melahirkan perusahaan *start-up decacorn* dan *unicorn*.

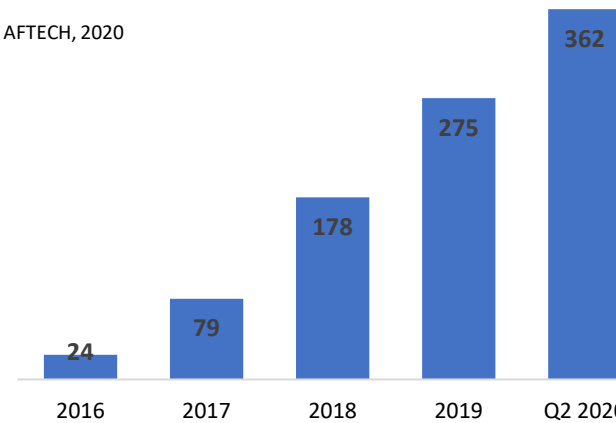
Fintech is defined as technology-enabled innovation in financial services that could result in new business models, applications, processes or products with an associated material effect on the provision of financial service. (Financial Stability Board, 2016)



teknologi yg telah diadaptasi berwarna kuning

Jumlah Perusahaan Fintech di Indonesia

Sumber: AFTECH, 2020

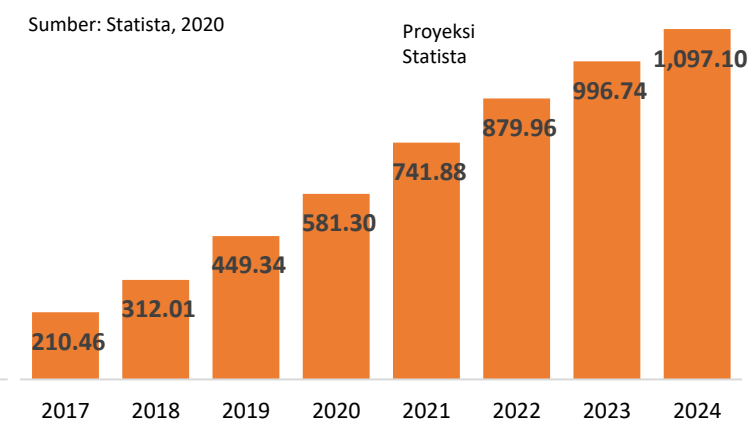


□ perusahaan yang merupakan anggota Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), mewakili 80% seluruh startup tekfin berlisensi di Indonesia

Nilai Transaksi Perusahaan Fintech di Indonesia (Rp triliun)

Sumber: Statista, 2020

Proyeksi Statista



- Pertumbuhan *fintech* menunjukkan adanya **kesempatan untuk meningkatkan sektor keuangan Indonesia**.
- Di sisi lain, tantangan juga muncul terutama bagi otoritas pengawas misalnya dalam **menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan konsumen**.

	Decacorn Nilai Valuasi: US\$10 miliar		Unicorn Nilai Valuasi: US\$7 miliar		Unicorn Nilai Valuasi: US\$3 miliar		Unicorn Nilai Valuasi: US\$2,9 miliar		Unicorn Nilai Valuasi: US\$2,5 miliar
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

Sumber: CB Insights, Oktober 2020

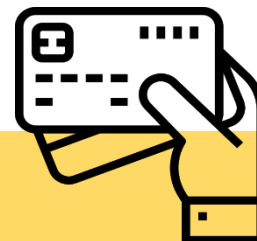
Pemerintah Terus Berupaya Mengoptimalkan Peran *Fintech*

Penyaluran bantuan sosial secara non-tunai

Penjualan SBN ritel secara online

Alternatif pembiayaan UMKM unbankable

Pelaporan dan pembayaran pajak secara online

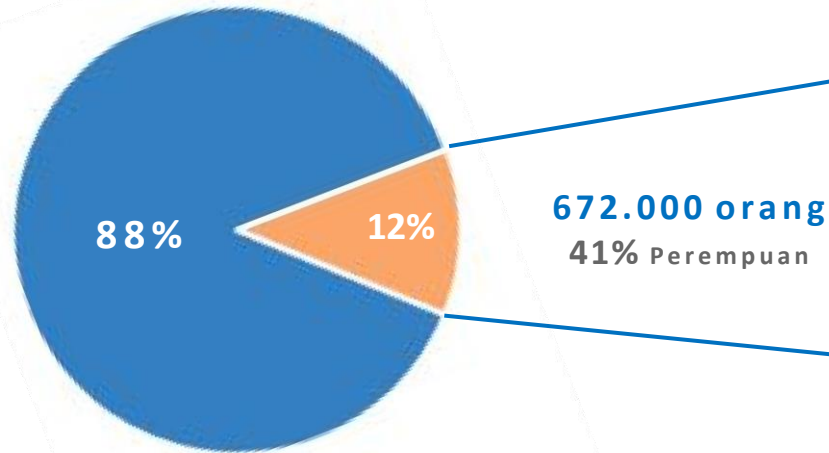


Penyaluran Insentif Kartu Pra Kerja melalui *Fintech*

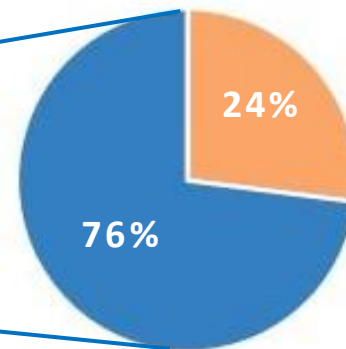
Pelibatan *fintech* dalam program Pemerintah dapat meningkatkan inklusi keuangan

Sebelum bergabung dengan Prakerja

Setelah bergabung dengan Prakerja



672.000 orang
41% Perempuan



- Memiliki rekening bank/e-wallet
- Tidak memiliki keduanya = 12% (terdiri dari 41% Perempuan, 59% Laki-Laki)

- Memiliki rekening e-wallet
- Memiliki rekening bank

Total Penerima Batch 1-10: 5.597.179
Per 31 Oktober 2020

E-wallet menjadi pilihan dari penerima Pra-Kerja yang sebelumnya belum memiliki rekening bank & e-wallet

5.298.217

Penerima punya rekening bank atau e-wallet*



Penjualan SBN Ritel melalui Mitra Distribusi *Fintech*

Pertumbuhan jumlah investor midis *fintech* sebagai indikator positif atas upaya peningkatan inklusi keuangan



- Dari sisi jumlah investor, porsi Mitra Distribusi (midis) *fintech* mengalami kenaikan yang signifikan dari penerbitan ORI sebelumnya
- Rata-rata volume pemesanan terkecil menunjukkan tingkat keritelan yang semakin membaik dan mencerminkan perkembangan positif atas upaya Pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan

Sumber: website DJPPR

Mendorong Pengembangan *Fintech*

Sebagai salah satu sumber alternatif pembiayaan UMKM *non-bankable*

Dukungan *Fintech* untuk UMKM

Membantu
UMKM mencari
sumber input
yang paling
efisien

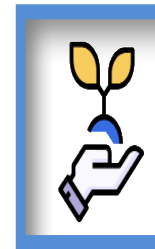
Menambah
jalur UMKM
dalam
memasarkan
output



Alternatif
Sumber
Pembiayaan

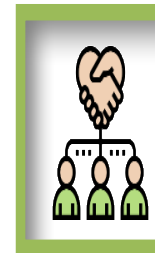
Proses dan
syarat
mudah,
secara
online.

Dukungan untuk Perekonomian dan Sektor Keuangan



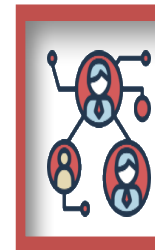
Mendukung keuangan inklusif

Mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan



Mendorong pendalaman **dan efisiensi** pasar keuangan

Dapat berperan sebagai sumber alternatif pembiayaan maupun alternatif untuk berinvestasi **serta mempercepat proses bisnis dan jangkauan layanan jasa keuangan**



Mendukung aktivitas ekonomi riil

Pembiayaan *Fintech* untuk usaha produktif mendorong peningkatan aktivitas pelaku usaha, sementara untuk sektor konsumtif akan mendorong *agregat demand*

Kerangka Dukungan Pemerintah

Pemerintah mendukung pengembangan *fintech* di Indonesia dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi

Tantangan Perkembangan *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia

- 1** Perlindungan konsumen (contoh: kejahatan siber dan data konsumen)
- 2** Keseimbangan inovasi dan regulasi untuk mendukung terciptanya ekosistem *fintech* yang kondusif

- 3** Literasi keuangan dan literasi digital

- 4** Infrastruktur keuangan

Dukungan terhadap *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia



Kebijakan dan Regulasi

Membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung inovasi dengan tetap memperhatikan faktor perlindungan konsumen



Infrastruktur

Membangun infrastruktur dasar dan infrastruktur keuangan yang kuat dan terintegrasi



Dukungan Pembiayaan

Menyediakan bantuan pembiayaan seperti melalui kredit program untuk meningkatkan akses keuangan bagi UMKM sehingga UMKM terbantu dalam mengembangkan bisnisnya



Insentif pajak



Pemberlakuan pajak bagi UMKM sebesar 0,5%

Perlindungan konsumen



Memberlakukan perlindungan konsumen, termasuk proteksi data dan keamanan siber

Pengembangan SDM



Menyelenggarakan edukasi keuangan melalui kurikulum sekolah, pelatihan, kampanye, dll



ICT MERUPAKAN SALAH SATU KEBIJAKAN STRATEGIS APBN 2021

Mendukung akselerasi *recovery* dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju



PENDIDIKAN (RP550,0T)

Penguatan kualitas pendidikan melalui peningkatan skor PISA dan penguatan penyelenggaraan PAUD serta peningkatan kompetensi guru



KESEHATAN (RP169,7T)

Akselerasi pemulihan kesehatan akibat Covid-19, melaksanakan reformasi JKN dan mempersiapkan *Health Security Preparedness*



PERLINDUNGAN SOSIAL (RP421,7T)

Mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap, yaitu perlinsos komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi *aging population*



INFRASTRUKTUR (RP413,8T)

Penyediaan infrastruktur untuk layanan dasar, peningkatan konektivitas, dan dukungan pemulihan ekonomi serta melanjutkan program prioritas yang tertunda



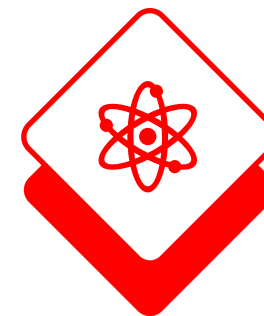
KETAHANAN PANGAN (RP104,2T)

Meningkatkan produksi pangan dan dukungan pemulihan ekonomi melalui revitalisasi sistem pangan nasional dan pengembangan *Food Estate*



PARIWISATA (RP15,7T)

Mendorong pemulihan sektor pariwisata dengan fokus 5 kawasan dan pengembangan skema KPBU



BIDANG ICT (RP29,6T)

Optimalisasi memanfaatkan ICT untuk mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik (efisiensi, kemudahan dan percepatan)

TERIMA KASIH



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**